



## Si Pembisik Diharap Cokot yang Lain

DUA orang tersangka yakni pegawai Dinas Keluarga Berencana Pemkab Badung Ketut SKTY dan pemilik perusahaan PT. MMI inisial MYK juga langsung ditahan kemarin (1/8). Kepala Seksi Penuntutan Pidana Khusus (Kasitut

Pidsus) Kejati Bali I Wayan Suardi didampingi Kasi Pidsus Kejari Denpasar Tri Syahru Wirakosada dan Kasi Intel Kejari Denpasar IGNA Kusumayasa Diputra kemarin di Kejari Denpasar ■

► Baca **Si Pembisik...** Hal 27

### Bancakan Duit Alkes RSUD Badung

- **Tersangka :**  
I Made N ; I Ketut SKTY, 48, dan MYK, 42
- **Kejadian :**  
Antara tahun 2013-2014
- **Kerugian Negara :**  
Rp 6,3 miliar
- **Peluang Tersangka Lain :**  
Pihak penyidik tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Bali Polda Bali masih menelisik kemungkinan



tersangka lain dari Made N yang bisa menguraikan keterlibatan nama lain (jadi whistle blower) dalam kasus alkes ini

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

## Yang Lain Bisa "Digigit"

### ■ SI PEMBISIK...

Sambungan dari hal 17

menjelaskan bahwa kasus dugaan korupsi alkes RSUD Mangusada Badung ini merupakan kasus lama, yakni tahun 2014.

Dalam pengadaan alkes, ini pihak Polda Bali pun mencium ada yang tidak beres. Akhirnya, melakukan penyelidikan

dan menetapkan tersangka dr N. Setelah dilakukan pengembangan, kembali Polda Bali menetapkan dua tersangka KSK dan MYK.

Peran dokter N disebut hanya sebagai pelaksana teknis. Masih ada pihak lain yang merancang permufakatan jahat melakukan korupsi alkes. Pejabat tinggi di Badung

bisa saja terseret jika penyidik berani mengusut atau *whistle blower*. Informasinya tersangka dokter N dijadikan pintu masuk atau sebagai pembisik yang membawa tersangka lain.

Seusai menerima pelimpahan tahap II (barang bukti dan tersangka) dari Ditreskrimsus Polda Bali untuk dua kasus korupsi berbeda, Kejaksaan

Tinggi (Kejati) Bali serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar langsung melakukan penahanan ke Lapas Kerobokan selama 20 hari. "Mereka kami tahan karena memang tidak ada penangguhan. Tapi, tidak menutup kemungkinan nanti tersangka lain. Sekarang kami masih kembangkan," pungkasnya. (pra/pit)

Edisi : Rabu, 2 Agustus 2017  
Hal : 17 dan 27



# Renovasi Gedung Mario Ditunda

## Gaji Dewan Naik, Rp 30 Miliar untuk Perjalanan Dinas

**TABANAN** — Kenaikan gaji anggota DPRD Tabanan, hibah dan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membutuhkan tambahan dana Rp 45 miliar dalam APBD Perubahan 2017 ternyata berimbas pula kepada beberapa proyek fisik yang penting. Di antaranya proyek renovasi Gedung Kesenian Ketut Mario Rp 9 miliar, lanjutan open stage sekaligus penataan Taman Kota Tabanan Rp 3,6 miliar, dan Museum Sagung Wah Rp 2,7 miliar.

Hal itu dibenarkan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tabanan Ida Bagus Wiratmaja kemarin. Dia mengatakan,

pihaknya memang berencana menunda beberapa proyek, salah satunya Gedung Mario untuk menutupi kebutuhan dana yang sebelumnya diminta DPRD Tabanan. "Baru rencana," aku Wiratmaja kemarin (1/8).

Terkait hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tabanan I Made Yudiana mengaku tidak mengetahui ada rencana penundaan program renovasi Gedung Mario. Katanya, proyek sejatinya malah sudah mulai berjalan. Beberapa waktu lalu juga sudah ada ritual ngeruk sebelum dilakukan renovasi.

"Kami akan koordinasi dengan Bapelitbang terkait itu (penundaan proyek renovasi Gedung Mario)," jelas dia.

Pantauan koran ini kemarin, kondisi Taman Kota Tabanan sudah memprihatinkan. Kini sudah gersang, dan bagian pasangan batu alam sudah

banyak yang lepas. Rencananya, taman kota ini akan diratakan menjadi bagian dari open stage. Gedung Mario juga saat ini sudah mulai dipasang pagar pengaman proyek. Sebanyak enam pekerja juga sedang membuat

bangunan kayu dan tripleks sementara untuk tinggal para pekerja proyek. "Baru seminggu memulai. Memasang pagar dan bedeng untuk 40-an buruh," kata Hendro, salah satu pekerja ketika ditemui kemarin.

### GARA-GARA GAJI DEWAN NAIK

- Proyek fisik di Tabanan terancam ditunda akibat kenaikan gaji dewan.
- Sebab, diperlukan dana Rp 45 miliar untuk menambah gaji DPRD Tabanan.
- Proyek yang terancam adalah renovasi Gedung Kesenian Ketut Mario, Taman Kota, dan Museum Sagung Wah.
- Kepala Bapelitbang Tabanan mengakui rencana penundaan beberapa proyek.
- Tapi, Plt Kadis PU I Made

Yudiana tak mengetahui soal rencana tersebut.

- BCW mengkritik kenaikan gaji dewan yang akhirnya membuat pembangunan fisik terbengkalai.
- Apalagi, Rp 30 miliar hanya untuk perjalanan dinas.



GRAFIS: GT.DEWANTARA/RADAR BALI

Rencana pemangkasan sejumlah program pembangunan fisik ini pun mendapat kecaman dari Bali Corruption Watch (BCW). Ketua BCW Putu Wirata Dwikora menilai lebih baik, sejumlah anggaran di DPRD Tabanan, khususnya perjalanan dinas keluar daerah yang dipangkas untuk menutupi gaji dewan. "Perjalanan dinas ke luar daerah anggota Dewan yang harus dirasionalisasi, bukan memangkas pembangunan fisik yang dibutuhkan masyarakat," kata Wirata. Diketahui, di APBD 2017 ini, perjalanan dinas anggota DPRD Tabanan mencapai Rp 33 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp 30 miliar untuk perjalanan dinas ke luar daerah. Saking besarnya anggaran perjalanan dinas ini, anggota DPRD Tabanan rata-rata melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak tiga kali dalam sebulan. Sekali jalan, umumnya tiga hari. Padahal, uang saku perjalanan

dinas anggota DPRD Tabanan mencapai Rp 2,3 juta per hari, atau Rp 6,9 juta per tiga hari. Dengan demikian, Rp 20,7 juta setiap bulan masuk kantong. Kalau ketua dan wakil ketua DPRD Tabanan, uang saku perjalanan dinasnya lebih besar lagi, yaitu bisa mencapai Rp 25,2 juta sebulan. "Kalau sampai memangkas program yang dibutuhkan publik untuk kenaikan gaji anggota dewan, ini sangat memprihatinkan," tandas.

Karena itu, sekali lagi, Wirata meminta anggota DPRD Tabanan untuk bisa menahan diri dalam menaikkan gajinya. Anggota Dewan harus punya kepekaan ketika keuangan daerah minim, maka bisa belajar diet anggaran. "Minimal anggota dewan menunda dalam menaikkan penghasilannya di tahun 2017 ini. Apakah dilakukan di tahun-tahun mendatang bila keuangan daerah memungkinkan," pungkasnya. (yor/gup)

Edisi : Rabu, 2 Agustus 2017  
Hal : 18



## Radial Bali

### Kerugian Negara Rp 1 Miliar Lebih

**DENPASAR** -Setelah dilimpahkan dari penyidik Subdit III Direktorat Reskrim-sus Polda Bali, berkas sekaligus dua tersangka kasus dugaan korupsi pemalsuan dokumen kepabeanan kapal Dream Bali berinisial JES, 43, dan HS, 45, Senin (1/8) petang sekitar pukul 17.45 langsung ditahan di Lapas Kelas II A Kerobokan.

Sebelum penahanan, kedua tersangka lebih dulu menyelesaikan administrasi di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar.

Kepala Seksi (Kasi) Penuntutan Pidsus Kejati Bali, Wayan Suardi didampingi Kasi Pidsus Kejari Denpasar Tri Syahru Wirakosada dan Kasi Intel Kejari Denpasar IGNA Kusumayasa Diputra menjelaskan, setelah menerima pelimpahan tahap II bagi dua tersangka kasus korupsi dan pemalsuan dokumen kepabeanan kapal Dream Bali senilai Rp 1 miliar lebih, dua tersangka langsung ditahan. "Kami langsung tahan. Sedangkan untuk tersangka lain masih dalam pengembangan," ujar Suardi.

Lebih lanjut, terkait peran kedua tersangka yang masing-masing berstatus sebagai PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,

Suardi menjelaskan kedua tersangka berperan memalsukan atau mengganti dokumen dengan penerbitan surat balik nama kapal dari Dream Tahiti berbendera Perancis menjadi Dream Bali berkebangsaan Indonesia "Jadi ada unsur penyalahgunaan wewenang dari kedua tersangka untuk melakukan pungutan liar," terang jaksa Kejati bertubuh tambun ini.

Sedangkan terkait tiga tersangka lain (RP selaku agent Isle Marine Service serta dua orang Nakhoda Kapal Freelance yaitu AW dan AR), Suardi menyatakan masih dalam proses penyidikan. "Masih

# Korupsi Kapal, 2 PNS Langsung Ditahan

## 5 Tersangka Korupsi Kapal

- 1 Tersangka JES berdinis di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas (KSOP) Pelabuhan Tanjung Benoa
- 2 Tersangka HS bertugas di KSOP Tanjung Wangi, Banyuwangi.
- 3 RP selaku agent Isle Marine Service
- 4 AW (Nakhoda Kapal Freelance)
- 5 AR (Nakhoda Kapal Freelance)



GRAFIS: GT  
DEWANTARAJ  
RADAR BALI

penyidikan, mohon sabar dulu," pintanya.

Suardi juga memastikan jika para tersangka akan segera menjalani persidangan. "Nanti sebagai pihak penuntutannya Kejari Denpasar. Sidang mungkin dua minggu kedepan sudah bisa digelar," terangnya

Sedangkan untuk pasal yang disangkakan, para tersangka dengan dijerat pasal 5, pasal 11, pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf e, pasal 9, pasal 15, pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Un-

dang Tipikor No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara.

Sekadar diketahui, dalam kasus ini polisi menetapkan 5 tersangka. Di antaranya, tersangka berinisial RP selaku agent Isle Marine Service; dan dua nakhoda kapal yaitu AW dan AR. "Tindak pidana korupsi ini mengakibatkan hilangnya hak negara dari Pendapatan Pajak Impor (PIB) Kapal Dream Bali mencapai Rp 1.096.449.000. Kami masih dalam untuk mencari tahu keterlibatan orang lain," kata Kasubdit III Direktorat Reskrim-sus Polda Bali AKBP Ida Putu Wedanajati, didampingi Kasubid Penmas AKBP Ayu Kusuma Dewi sebelum pelimpahan dua tersangka kemarin. (pra/dre/dot)



# Tersangka Korupsi Alkes Dibeber

## Diduga Rugikan Negara Rp 6,5 Miliar

DENPASAR - Penyidik Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Bali akhirnya menetapkan tiga tersangka korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Badung. Dari korupsi ini ditengarai mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 6,3 miliar dengan tiga tersangka sementara I Made N ; I Ketut SKTY, 48, dan MYK, 42.

Dalam keterangannya, Kasubdit III Direktorat Reskrimsus Polda Bali AKBP Ida Putu Wedanajati didampingi Kasubid Penmas AKBP Ayu Kusuma Dewi, kemarin (1/8) menyatakan bahwa pihaknya masih memeriksa keterangan intensif satu orang lagi. Salah satu dari tiga orang tersangka alkes RSUD Badung yang dimaksud itu adalah dr. I Made N selaku pejabat pembuat komitmen.

"Yang satu ini sudah tersangka (Made N). Namun, kami masih melakukan pengembangan lagi dengan mengambil keterangannya," sebut AKBP Ida Putu Wedanajati sembari mengatakan bahwa dua I Ketut SKTY dan MYK, sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, kemarin.



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

**MAINKAN UANG NEGARA** : Tersangka Ketut SKTY (kiri) dan MYK kemarin kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan.

Lebih jauh disampaikan bahwa SKTY menjabat sebagai salah satu kepala seksi di BKKBN Kabupaten Badung. SKTY saat itu selaku kepala Unit Layanan Pengadaan. Tersangka asal Jimbaran, Kuta Selatan, dan memiliki gelar S2 turut serta bertanggung jawab atas terbentuknya harga perkiraan sendiri (HPS). "Sistemnya dengan cara memanipulasi data perolehan informasi nilai harga pada tiga perusahaan dan setiap item barang tidak sesuai prosedur," tuturnya. SKTY juga bertanggung jawab dalam proses lelang agar memenangkan PT MMI sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa dengan surat perjanjian kontrak tidak sah

► Baca Tersangka... Hal 27

Edisi : Rabu, 2 Agustus 2017  
Hal : 17



Sambungan - - -

## Membuat Keuntungan dari Selisih Harga

### ■ TERSANGKA...

Sambungan dari hal 17

Sementara MYK selaku pemilik PT MMI (Mapan Medika Indonesia) yang memenangkan pengadaan alat kesehatan (alkes) dan KB serta kendaraan khusus tahun anggaran 2013. "Item barang yang dimanipulasi dari harga sebenarnya di antaranya bed site monitor untuk IGD, peralatan bank darah, meja operasi, instrumen set bedah saraf, instrumen ortopedi serta lainnya. Ada juga peralatan non medis berupa ambulans jantung dan ambulans bencana," begitu antara lain rinciannya.

Wedanajati menegaskan bahwa dengan penetapan PT MMI sebagai pemenang dengan cara melawan hukum melahir-

kan surat perjanjian kontrak tidak sah senilai Rp 21,1 miliar. Setelah dipotong pajak 10 persen, uang yang masuk ke rekening atas nama PT MMI sebesar Rp 19,2 miliar.

Uang ini antara lain dibelanjakan dalam wujud barang serta kepentingan masyarakat di RSUD Badung Rp 12,9 miliar. "Setelah ditelusuri, jelas terjadi selisih belanja riil ditambah PPN dari nilai kontrak. Kerugian negara mencapai Rp 6,28 miliar," cetusnya.

Perkara ini diusut Polda Bali mulai 2014 dengan memeriksa 32 orang saksi termasuk dua saksi ahli dari Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (BPKP). Dalam kesempatan tersebut, dia mengakui bahwa jika ada ter-

duga tersangka lain terungkap, nanti semuanya terungkap dalam fakta persidangan.

Informasi lain yang diperoleh koran ini menyebutkan bahwa pada tahun 2013 dilakukan lelang pengadaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan (Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dan Kendaraan Khusus). Ini untuk RSUD Mangusada yang dananya bersumber dari APBN.

Nilai Pagu Rp 24.947.029.999,00 dan nilai HPS Paket Rp 24.920.606.700,00. Ada sedikitnya 26 peserta lelang yang ikut. Akhirnya PT. Mapan Medika Indonesia (PT.MMI) yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai No 126.C Denpasar sebagai pemenang lelang dengan nilai harga Rp 21.132.621.000,00.

Ada pun jenis barang yang diadakan yakni satu instrumen bedah tulang, instrumen bedah saraf, ada monitor untuk di IGD, ada mobil ambulans jantung dan mobil siaga bencana. Pada saat pengadaan tahun 2013 silam itu yang menjabat sebagai Direktur Utama RSUD Mangusada adalah Agus Bintang Suryadhi.

Sementara Ketut SKTY sebagai Kepala ULP pada pengadaan di RSUD Mangusada. Namun, pada pelantikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badung, Agus Bintang Suryadhi dimutasi dan kini dia menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badung. Begitu juga Ketut SKTY dimutasi di

tempat yang sama.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama RSUD Mangusada Nyoman Gunarta kepada koran ini tak menampik kabar tersebut. Namun pada saat pengadaan itu dia belum menjabat sebagai direktur. "Kebetulan saya baru menjabat dirut Desember 2016 dan pengadaan itu masih dijabat oleh direktur yang lama," sergahnya.

Dia mengakui bahwa Ketut SKTY pada tahun 2013, itu dulu sempat bertugas RSUD Mangusada. Tapi, akhirnya dimutasi ke

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Badung. "Intinya kami tetap menghormati proses hukum," terangnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Ni Putu Rianingsih mengakui Ketut SKTY kini PNS di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Badung.

Namun, kalau masalah hu-

kum menurutnya itu masih status hukum tersangka. Karena mesti dilakukan penguatan bukti-bukti mengenai benar atau tidaknya.

"Yang jelas sampai saat ini yang bersangkutan tetap aktif bekerja. Dia memang orang yang produktif, pekerjaan yang diberikan selesai. Tidak pernah kelihatan sebagai tersangka. Kalau itu (tersangka) menyangkut tugas lama, *tiyang* (saya) tidak tahu kebenarannya. Yang jelas mereka tetap loyal dan disiplin," pungkasnya. (dre/dwi/pit)

Edisi : Rabu, 2 Agustus 2017

Hal : 27